



PLURALISM AND SOCIAL JUSTICE IN PANCASILA DEMOCRACY: BETWEEN IDEALS AND REALITY

MENGGAPEADILAN SOSIAL BERDASARKANDEMOKRASI PANCASILA: ANTARA CITA-CITA DAN REALITAS

Emanuel Raja Damaitu^{1*}

* Center for Critical Studies and Democracy, Faculty of Law, Universitas
Jember

*emanuelraja@unej.ac.id

Volume 3, Number 1, March 2025

Received: February 12, 2025 Accepted: February 12, 2025 Online Published: March 27, 2025.

ABSTRACT

The Reform Era, which began with the fall of the Suharto regime in 1998, marked a shift towards a democratic system of governance. This system is considered suitable for Indonesia's highly pluralistic society. However, in practice, pluralism often serves merely as a rhetorical slogan to reinforce Indonesia's national unity. The dominance of fundamentalist groups remains a significant challenge to democracy, as evidenced by various cases, including obstacles to the construction of places of worship, difficulties in civil registration for adherents of Indigenous beliefs, and the requirement for students practicing indigenous faiths to choose an officially recognized religion in the formal education system. Using a conceptual and descriptive approach, this study examines the concept of social justice within Pancasila democracy and explores efforts to achieve it. The findings indicate that social justice in Pancasila democracy is reflected in fulfilling individuals' right to develop their potential and meet their basic needs. This aligns with the national development goals outlined in the Preamble of the 1945 Constitution, which aims to promote general welfare and advance national intelligence. Achieving social justice within Pancasila democracy requires collective awareness of the importance of coexistence in diversity. This awareness can be fostered through participatory development models that engage all societal sectors, ensuring that development is not solely the government's responsibility. From a legal perspective, the construction of laws must be oriented towards social integration within Indonesia's plural society.

Keywords : Social Justice; Pancasila Democracy; National Development

ABSTRAK

*Era Reformasi yang dimulai dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 menandai pergeseran menuju sistem pemerintahan demokratis. Sistem ini dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Namun, pada kenyataannya, pluralisme sering kali hanya menjadi slogan untuk membingkai Indonesiasebagai negara kesatuan. Dominasi kelompok fundamentalis masih menjadi tantangan dalam praktik demokrasi, seperti terlihat dalam berbagai kasus, termasuk hambatan pembangunan rumah ibadah, kesulitan pendaftaran administrasi kependudukan bagi kelompok penghayat kepercayaan, serta kewajiban memilih salah satu agama dalam sistem pendidikan formal bagi mereka yang menganut kepercayaan lokal. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan deskriptif, penelitian ini menggali lebih dalam konsep keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila serta upaya pencapaiannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila tercermin dalam pemenuhan hak setiap individu untuk mengembangkan potensinya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan keadilan sosial dalam demokrasi Pancasila, diperlukan kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup bersama dalam keberagaman. Kesadaran ini dapat diwujudkan melalui model pembangunan partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sehingga pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dari aspek hukum, diperlukan pembangunan hukum yang berorientasi pada integrasi sosial dalam masyarakat yang plural.*Kata Kunci: Keadilan sosial, Demokrasi Pancasila, Pembangunan nasional.

Kata Kunci : Keadilan sosial, Demokrasi Pancasila, Pembangunan nasional.